PANDUAN BELAJAR

Perpajakan Indonesia

Untuk Peserta Meeting

Persiapan SPT Tahunan 2025

Senin, 20 April 2026

Materi mencakup:

Konsep Dasar Pajak | Rekonsiliasi Fiskal | Kredit Pajak | Istilah & Singkatan | Tips Meeting

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Bab 1 — Mengenal Sistem Perpajakan Indonesia

Sebelum masuk ke detail teknis, penting untuk memahami gambaran besar sistem perpajakan Indonesia. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Bagi perusahaan, pajak yang paling utama adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

1.1 Apa itu SPT Tahunan?

SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan. SPT Tahunan adalah laporan resmi yang wajib disampaikan oleh setiap Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahun, yang berisi:

- Jumlah penghasilan yang diterima selama setahun
- Perhitungan pajak yang terutang
- Kredit pajak yang sudah dibayarkan
- Posisi akhir: lebih bayar atau kurang bayar

> **Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan**
> SPT Tahunan Badan (perusahaan): paling lambat 30 April tahun berikutnya. Untuk tahun pajak 2025, batas akhirnya adalah 30 April 2026 — hanya 10 hari setelah meeting tanggal 20 April 2026.

1.2 Wajib Pajak & DJP

Beberapa pihak yang perlu kamu kenali:

Istilah	Penjelasan
Wajib Pajak (WP)	Pihak yang diwajibkan membayar pajak — bisa berupa orang pribadi atau badan (perusahaan).
DJP	Direktorat Jenderal Pajak — instansi di bawah Kemenkeu yang mengurus perpajakan Indonesia.
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak — nomor identitas perpajakan, seperti 'KTP' untuk urusan pajak.
DJP Online	Portal resmi pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik di djponline.pajak.go.id.

1.3 Jenis-Jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam konteks meeting persiapan SPT, beberapa jenis PPh yang sering disebut:

Istilah	Penjelasan
PPh Badan	Pajak atas laba perusahaan. Tarif flat 22% dari

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

	Penghasilan Kena Pajak (PKP).
PPh Pasal 21	Dipotong dari penghasilan karyawan (gaji, tunjangan). Perusahaan sebagai pemotong.
PPh Pasal 22	Dipotong saat transaksi impor atau pembelian barang dari instansi pemerintah/BUMN tertentu.
PPh Pasal 23	Dipotong saat perusahaan membayar jasa, dividen, bunga, atau royalti kepada pihak lain.
PPh Pasal 25	Angsuran pajak bulanan yang dibayar sendiri oleh perusahaan sepanjang tahun.
PPh Final	Pajak yang bersifat final — tidak diperhitungkan lagi di SPT Tahunan (misal: PPh atas sewa tanah/bangunan).

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Bab 2 — Rekonsiliasi Fiskal (Konsep Terpenting)

Rekonsiliasi fiskal adalah konsep yang paling banyak dibahas dalam meeting persiapan SPT. Memahami ini berarti kamu sudah siap mengikuti 70% diskusi.

2.1 Mengapa Ada Rekonsiliasi Fiskal?

Laporan keuangan perusahaan dibuat berdasarkan standar akuntansi (PSAK/GAAP). Namun, untuk keperluan pajak, DJP memiliki aturan sendiri tentang biaya apa yang boleh dikurangkan dan tidak. Perbedaan inilah yang direkonsiliasi.

Analogi Sederhana

Bayangkan kamu punya pemasukan Rp100 juta. Menurut catatan keuanganmu, pengeluaranmu Rp60 juta sehingga untungmu Rp40 juta. Namun DJP tidak mengakui beberapa pengeluaranmu, sehingga menurut DJP pengeluaranmu hanya Rp50 juta dan untungmu Rp50 juta. Nah, selisih Rp10 juta inilah yang direkonsiliasi.

2.2 Koreksi Fiskal Positif & Negatif

Ada dua jenis koreksi dalam rekonsiliasi fiskal:

Koreksi Positif	Koreksi Negatif
Menambah laba fiskal (lebih besar dari laba komersial) Terjadi karena biaya komersial TIDAK diakui pajak.	Mengurangi laba fiskal (lebih kecil dari laba komersial) Terjadi karena penghasilan tertentu bersifat final/tidak kena pajak.

2.3 Contoh Biaya yang Sering Dikoreksi

Berikut contoh biaya yang umum dikoreksi dalam rekonsiliasi fiskal:

Istilah	Penjelasan
Biaya natura/kenikmatan	Fasilitas yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk barang/jasa (misal: mobil dinas untuk kebutuhan pribadi). Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Biaya entertainment	Biaya jamuan tamu/relasi. Dapat dikurangkan, namun harus disertai daftar nominatif yang lengkap.
Biaya denda/sanksi	Denda pajak atau sanksi hukum tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan.
Penyusutan berbeda	Masa manfaat aset menurut akuntansi vs pajak bisa berbeda — menimbulkan beda waktu (temporary

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

	difference).
Biaya tidak wajar	Biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat dikoreksi oleh DJP.

2.4 Beda Tetap vs Beda Waktu

Perbedaan antara laba komersial dan fiskal dibagi menjadi dua kategori:

Istilah	Penjelasan
Beda Tetap (Permanent)	Perbedaan yang tidak akan terbalik di masa mendatang. Contoh: biaya sumbangan yang tidak boleh dikurangkan pajak selamanya. Selalu masuk koreksi fiskal setiap tahun.
Beda Waktu (Temporary)	Perbedaan yang pada akhirnya akan terbalik. Contoh: penyusutan aset dengan metode berbeda. Tahun ini mungkin ada koreksi positif, tahun depan bisa koreksi negatif.

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Bab 3 — Kredit Pajak & Perhitungan Akhir

Setelah memahami rekonsiliasi fiskal, langkah berikutnya adalah memahami bagaimana PPh terutang dihitung dan dibandingkan dengan kredit pajak yang sudah dibayarkan.

3.1 Alur Perhitungan PPh Badan

1	Penghasilan Bruto (total pendapatan usaha)	
2	Dikurangi: Biaya yang diperbolehkan secara fiskal	**(-)**
3	= Penghasilan Neto Fiskal (laba setelah koreksi)	
4	Dikurangi: Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (jika ada)	**(-)**
5	= Penghasilan Kena Pajak (PKP)	
6	PPh Terutang = PKP x 22%	**x22%**
7	Dikurangi: Kredit Pajak (PPh 21, 22, 23, 25, dll)	**(-)**
8	**= PPh Kurang Bayar / Lebih Bayar**	**HASIL**

3.2 Memahami Kredit Pajak

Kredit pajak adalah pajak yang sudah dibayarkan atau dipotong pihak lain sepanjang tahun. Total kredit pajak ini akan mengurangi PPh terutang di akhir tahun.

Istilah	Penjelasan
PPh Pasal 21	PPh yang dipotong dari gaji karyawan — sudah disetor ke DJP oleh perusahaan tiap bulan.
PPh Pasal 22	Dipotong saat perusahaan melakukan impor atau bertransaksi dengan instansi tertentu.
PPh Pasal 23	Dipotong oleh klien/mitra saat membayar jasa kepada perusahaan. Dibuktikan dengan bukti potong.
PPh Pasal 25	Angsuran pajak bulanan yang dibayar sendiri oleh perusahaan berdasarkan estimasi PPh tahun ini.
PPh Final	Tidak menjadi kredit pajak — sudah final dan tidak masuk perhitungan SPT Tahunan.

3.3 Lebih Bayar vs Kurang Bayar

Lebih Bayar	Kurang Bayar

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Kredit Pajak > PPh Terutang	Kredit Pajak < PPh Terutang
Perusahaan berhak mengajukan restitusi (pengembalian) atau dikompensasikan ke tahun berikutnya.	Perusahaan harus melunasi kekurangan sebelum lapor SPT. Terlambat bayar = ada sanksi denda 2% per bulan.

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Bab 4 — Dokumen Penting dalam SPT

Salah satu agenda meeting adalah mengecek kelengkapan dokumen. Berikut dokumen-dokumen yang perlu kamu kenali.

4.1 Dokumen Keuangan Utama

Istilah	Penjelasan
Laporan Laba Rugi	Laporan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba/rugi perusahaan selama setahun. Ini adalah dasar perhitungan pajak.
Neraca (Balance Sheet)	Laporan posisi keuangan — aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan per akhir tahun.
Rekening Koran	Mutasi rekening bank perusahaan — digunakan untuk verifikasi transaksi.
Faktur Pajak	Bukti transaksi yang sudah dikenakan PPN. Dikelola melalui aplikasi e-Faktur.

4.2 Bukti Potong

Bukti potong adalah dokumen krusial — tanpanya, kredit pajak tidak bisa diklaim.

Istilah	Penjelasan
1721-A1	Bukti potong PPh 21 untuk karyawan swasta. Diterbitkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan.
1721-A2	Bukti potong PPh 21 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bukti Potong PPh 23	Diterbitkan oleh klien/mitra yang memotong PPh 23 saat membayar jasa ke perusahaan.
SSP/SSE	Surat Setoran Pajak / Elektronik — bukti bahwa pajak sudah dibayar ke kas negara.

> **Hal yang Sering Jadi Masalah**
>
> Bukti potong PPh 23 sering belum diterima dari klien menjelang deadline. Ini perlu dikejar jauh-jauh hari. Tanpa bukti potong, kredit pajak tidak bisa diklaim meski secara nyata pajak sudah dipotong.

4.3 Lampiran Wajib SPT Tahunan Badan

1. Laporan keuangan (neraca dan laba rugi) yang telah diaudit atau tidak diaudit
2. Daftar penyusutan dan amortisasi aset

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

3. Perhitungan rekonsiliasi fiskal
4. Daftar kredit pajak (PPh 21, 22, 23, 25)
5. SSP/bukti setor PPh kurang bayar (jika ada)
6. Laporan transaksi afiliasi (jika ada transaksi dengan perusahaan terkait)

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Bab 5 — Area Risiko & Regulasi

Memahami area risiko membantu kamu mengerti mengapa tim pajak sangat berhati-hati dalam proses persiapan SPT.

5.1 Transfer Pricing

Transfer pricing adalah penetapan harga dalam transaksi antara perusahaan yang masih satu grup (afiliasi). DJP sangat memperhatikan ini karena perusahaan berpotensi 'memindahkan' laba ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah.

Prinsip Arm's Length

DJP mensyaratkan bahwa transaksi antar afiliasi harus dilakukan dengan harga yang wajar — seolah-olah dilakukan dengan pihak yang tidak terkait. Jika harga tidak wajar, DJP dapat melakukan koreksi. Perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi wajib menyiapkan dokumentasi transfer pricing.

5.2 Kompensasi Kerugian

Jika perusahaan mengalami kerugian secara fiskal, kerugian tersebut dapat dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya, maksimal 5 tahun. Ini artinya laba tahun ini bisa dikurangi dengan kerugian tahun sebelumnya, sehingga PPh yang dibayar lebih kecil.

5.3 Angsuran PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan di tahun 2026 dihitung berdasarkan PPh terutang tahun 2025 dibagi 12. Maka begitu SPT 2025 selesai dihitung, angsuran PPh 25 untuk bulan-bulan berikutnya perlu diperbarui.

5.4 Regulasi yang Sering Disebut

Istilah	Penjelasan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan — aturan teknis perpajakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
SE DJP	Surat Edaran DJP — petunjuk pelaksanaan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak.
PP	Peraturan Pemerintah — peraturan yang diterbitkan oleh Presiden sebagai turunan dari undang-undang.
UU HPP	Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan — UU pajak terbaru yang mengubah banyak ketentuan.

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Bab 6 — Glosarium Lengkap

Berikut kumpulan istilah dan singkatan yang paling sering muncul dalam diskusi perpajakan.

6.1 Singkatan Umum

Istilah	Penjelasan
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
WP	Wajib Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan
PKP	Penghasilan Kena Pajak (konteks PPh) / Pengusaha Kena Pajak (konteks PPN)
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
SSP/SSE	Surat Setoran Pajak / Elektronik
e-Filing	Pelaporan SPT secara elektronik
e-Faktur	Aplikasi pengelolaan faktur pajak elektronik
KPP	Kantor Pelayanan Pajak — kantor DJP di tingkat kota/kabupaten

6.2 Istilah Teknis

Istilah	Penjelasan
Laba Komersial	Laba menurut standar akuntansi (PSAK), sebelum koreksi pajak.
Laba Fiskal	Laba setelah rekonsiliasi fiskal — dasar perhitungan PPh Badan.
Rekonsiliasi Fiskal	Proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal sesuai aturan pajak.
Koreksi Fiskal	Penyesuaian yang dilakukan dalam rekonsiliasi — bisa positif (menambah) atau negatif (mengurangi).
Kredit Pajak	Total pajak yang sudah dibayar/dipotong sepanjang tahun, sebagai pengurang PPh terutang.
Restitusi	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh DJP kepada WP.

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Kompensasi	Pengalihan kelebihan pajak atau kerugian fiskal ke masa pajak berikutnya.
Beda Tetap	Perbedaan laba komersial vs fiskal yang permanen dan tidak berbalik.
Beda Waktu	Perbedaan laba komersial vs fiskal yang bersifat sementara dan akan berbalik.
Transfer Pricing	Penetapan harga transaksi antar perusahaan afiliasi/satu grup.
Arm's Length	Prinsip kewajaran harga — transaksi afiliasi harus seperti transaksi antar pihak independen.
Natura	Imbalan kepada karyawan dalam bentuk barang/jasa, bukan uang tunai.
Penyusutan (Fiskal)	Pengurangan nilai aset secara bertahap sesuai aturan pajak (bisa berbeda dari akuntansi).
Angsuran PPh 25	Cicilan PPh yang dibayar setiap bulan oleh perusahaan secara mandiri.
Bukti Potong	Dokumen resmi sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong oleh pihak tertentu.
Nominatif	Daftar terperinci yang menyebut nama, tanggal, dan jumlah (misal: daftar nominatif entertainment).

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Bab 7 — Tips untuk Meeting 20 April 2026

Dengan waktu kurang dari dua minggu, berikut panduan praktis agar kamu bisa mengikuti meeting dengan percaya diri.

7.1 Yang Perlu Dipahami Sebelum Meeting

7. Alur besar perhitungan PPh Badan (Bab 3) — ini yang paling sering jadi topik diskusi utama.
8. Arti rekonsiliasi fiskal dan mengapa itu penting (Bab 2).
9. Perbedaan antara lebih bayar dan kurang bayar, serta konsekuensinya.
10. Nama-nama dokumen yang tercantum di Bab 4 — agar tidak bingung saat disebut.
11. Singkatan-singkatan di Bab 6 — baca sekilas, tidak perlu dihafal semua.

7.2 Sikap yang Tepat Saat Meeting

- Catat setiap istilah yang belum kamu pahami — tanyakan setelah meeting, bukan potong di tengah diskusi kecuali memang ada kesempatan.
- Dengarkan angka-angkanya — coba ikuti apakah hasilnya lebih bayar atau kurang bayar.
- Jangan ragu bertanya ke rekan senior setelah meeting — di dunia pajak, orang yang mau belajar sangat dihargai.
- Fokus pada keputusan yang diambil — siapa PIC-nya, apa yang harus dilakukan, kapan deadline-nya.

7.3 Pertanyaan yang Wajar untuk Ditanyakan

Pertanyaan yang bisa kamu ajukan sebagai orang baru

"Apakah sudah ada angka awal untuk rekonsiliasi fiskalnya?" | "Dokumen mana yang masih belum terkumpul?" | "Siapa yang menjadi penandatangan SPT?" | "Apakah ada potensi kurang bayar yang perlu disiapkan pembayarannya?"

7.4 Jadwal Belajar 10 Hari

Hari	Fokus Belajar
Hari 1 – 2	Bab 1 & Bab 6: Kenali sistem pajak dasar dan hafalkan singkatan umum.
Hari 3 – 4	Bab 2: Pahami rekonsiliasi fiskal, koreksi positif/negatif, beda tetap & beda waktu.
Hari 5 – 6	Bab 3: Pahami alur hitung PPh Badan dan konsep kredit pajak.

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar

Hari 7 – 8	Bab 4 & 5: Kenali nama-nama dokumen dan area risiko transfer pricing.
Hari 9	Review semua bab — baca ulang bagian yang masih kurang jelas.
Hari 10 (H-1 meeting)	Bab 7: Baca tips meeting, siapkan pertanyaan, pastikan kamu tahu urutan agenda.

Pesan Penutup

Tidak ada yang langsung ahli dalam perpajakan. Bidang ini memang kompleks dan terus berubah — bahkan para profesional pun terus belajar. Yang terpenting adalah kamu mau memahami alurnya secara bertahap. Setelah meeting, pengalaman langsung akan jauh mempercepat pemahamanmu. Semangat!

© 2026 - Untuk Keperluan Belajar